

Suci Tri Wahyuni_2313031012

“Kasus Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

Pemerintah Provinsi Nusantara Raya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah penduduk: 8 juta jiwa
- Anggaran pendidikan: 22% dari APBD
- 68% anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru
- 12% untuk infrastruktur
- 8% untuk program bantuan siswa (beasiswa & subsidi)
- 12% untuk administrasi dan lainnya

Namun, hasil evaluasi menunjukkan:

- Skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional
- Ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi
- Banyak sekolah memiliki guru berlebih di kota, tetapi kekurangan guru di daerah terpencil
- Infrastruktur digital sangat terbatas

Sebagai pembandingan, pemerintah pusat ingin mendorong reformasi dengan merujuk praktik negara anggota OECD yang:

- Memiliki sistem performance-based budgeting
- Mengalokasikan dana berbasis kebutuhan siswa
- Mengutamakan peningkatan kualitas guru
- Menggunakan sistem evaluasi berbasis data

Analisis Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Menurut saya, struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya masih belum sepenuhnya efisien. Meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai 22% dari APBD, hasil yang diperoleh belum menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan. Hal ini terlihat dari rendahnya skor literasi dan numerasi siswa serta masih tingginya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Sebanyak 68% anggaran digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Persentase ini terlalu besar jika dibandingkan dengan alokasi untuk program peningkatan mutu pendidikan lainnya. Sementara itu, bantuan siswa hanya memperoleh 8% dan infrastruktur 12%, padahal masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan teknologi digital.

Menurut saya, sebagian anggaran dari pos gaji dan administrasi perlu direalokasikan untuk:

- Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Pengembangan infrastruktur digital sekolah.
- Program bantuan siswa dari keluarga kurang mampu.
- Penyediaan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil.

Realokasi ini penting agar anggaran tidak hanya habis untuk belanja rutin, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Saat ini pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih sangat bergantung pada pemerintah daerah. Ketergantungan yang terlalu besar dapat membatasi ruang pengembangan pendidikan apabila kondisi keuangan daerah mengalami penurunan.

Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dan skema pembiayaan alternatif perlu dipertimbangkan. Beberapa model yang dapat diterapkan antara lain:

a. Public Private Partnership (PPP)

Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk pembangunan laboratorium, jaringan internet sekolah, serta penyediaan perangkat pembelajaran digital.

b. Corporate Social Responsibility (CSR)

Perusahaan dapat berkontribusi melalui program beasiswa, bantuan sarana pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi siswa.

c. Dana Abadi Pendidikan Daerah

Pemerintah daerah dapat membentuk dana abadi yang hasil investasinya digunakan untuk mendukung program pendidikan jangka panjang.

Dengan adanya sumber pendanaan tambahan, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa membebani APBD secara berlebihan.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Beberapa praktik negara OECD yang realistis untuk diadopsi di Indonesia adalah:

a. Performance-Based Budgeting

Alokasi anggaran didasarkan pada pencapaian kinerja sekolah. Sekolah yang menunjukkan peningkatan mutu dapat memperoleh tambahan dukungan anggaran.

b. Pendanaan Berbasis Kebutuhan Siswa

Sekolah yang memiliki banyak siswa miskin, berkebutuhan khusus, atau berada di daerah terpencil memperoleh dana lebih besar.

c. Peningkatan Kualitas Guru

Fokus pada pelatihan berkelanjutan, evaluasi kompetensi, dan pengembangan karier guru.

d. Sistem Evaluasi Berbasis Data

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data capaian belajar, kondisi sekolah, dan kebutuhan peserta didik.

Namun, implementasi di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- Kualitas data pendidikan yang belum merata.
- Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil.
- Resistensi terhadap perubahan sistem penganggaran.
- Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia antar daerah.

Karena itu, penerapan model OECD harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

4. Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun

Tahun 1–2: Penataan Anggaran dan Distribusi Guru

- Menurunkan proporsi belanja administrasi dari 12% menjadi 8%.
- Melakukan redistribusi guru dari daerah yang kelebihan guru ke daerah yang kekurangan.
- Meningkatkan anggaran pelatihan guru.
- Membuat sistem data pendidikan terintegrasi.

Tahun 3–4: Digitalisasi dan Peningkatan Mutu

- Menyediakan akses internet bagi seluruh sekolah.
- Pengadaan perangkat pembelajaran digital.
- Pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa.
- Penerapan pendanaan berbasis kebutuhan sekolah.

Tahun 5: Implementasi Sistem Berbasis Kinerja

- Menerapkan performance-based budgeting secara penuh.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian literasi dan numerasi.
- Memberikan penghargaan dan insentif kepada sekolah yang menunjukkan peningkatan kinerja.

Struktur Belanja yang Diusulkan Setelah Reformasi

Komponen	Sebelum	Sesudah
Gaji dan Tunjangan Guru	68%	55%
Infrastruktur dan Digitalisasi	12%	20%

Bantuan Siswa	8%	12%
Pengembangan Kompetensi Guru	0% (tergabung)	8%
Administrasi dan Lainnya	12%	5%

Kesimpulan

Menurut saya, permasalahan utama pendidikan di Nusantara Raya bukan terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada efektivitas penggunaannya. Reformasi perlu diarahkan pada pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi sekolah, dan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja. Dengan reformasi yang dilakukan secara bertahap selama lima tahun, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat dan kesenjangan antara sekolah di kota dan desa dapat dikurangi.